

PROFIL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV SUMSEL

Pada awalnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan bernama Biro Keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl.Kapten A Rivai No.3 Palembang, Biro Keuangan berdiri sejak adanya Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaga Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814).

Namun dengan berkembangnya pembangunan dan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat, maka titik berat pembangunan diarahkan ke daerah dan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dimana arah pembangunan dititik beratkan di daerah, maka struktur organisasi Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Sekarang Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan). Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas digantinya Biro Keuangan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkantor di Jl.Merdeka No.8 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang, sejak Tahun 2019 Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah pindah dan beralamat di Jl.Kapten A Rivai No. 51 Palembang Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang.

Dengan diterbitkannya peraturan daerah TK I Sumatera Selatan Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pengguna yang baru dengan tugas dan fungsi yang sama maka pada tahun 2012 Biro keuangan resmi diganti menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah.